

BAB IV

KEBIJAKAN *DISABILITY-FRIENDLY* AUSTRALIA (2010-2018)

Bab IV membahas tentang kebijakan ramah/*friendly* disabilitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia secara komprehensif baik *federal* maupun *state* yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 2010-2018. Bab ini merupakan pembuktian hipotesa, sehingga sub bab terdiri dari sejumlah data yang menguatkan dan membuktikan hipotesa serta membahas tentang kerjasama antara pemerintah dan *stakeholder* (NGO) Australia dalam implementasi kebijakan ramah disabilitas.

Seperti yang kita ketahui, permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas bukanlah menjadi hal yang baru di Australia. Pemerintah Australia telah sejak lama mempertimbangkan untuk lahirnya suatu kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Inisiatif dan inovasi pengembangan kebijakan terus dilakukan untuk menemukan satu paket kebijakan yang ramah/*friendly* terhadap penyandang disabilitas. Untuk memaksimalkan upaya ini Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan kebijakan *National Disability Strategy 2010-2020* dengan skala nasional maupun internasional untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap disabilitas. Pada tahap ini, Australia melakukan kerjasama komprehensif dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah negara bagian dan teritori, pemerintah lokal dan penyandang disabilitas untuk bersama memberikan usaha terbaik dalam menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan hak disabilitas. Pemerintah Australia juga bekerjasama dengan NGO atau lembaga yang bergerak pada pelayanan disabilitas untuk membantu mereka memilih jenis pelayanan yang mereka butuhkan.

Pada bab analisa ini penulis mencoba untuk menjabarkan lebih jauh terkait bagaimana kebijakan dan implementasi kebijakan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Secara singkat, menurut penulis kebijakan Australia terkait disabilitas dapat dikatakan sudah sangat ramah/*friendly* terhadap penyandang disabilitas. Pernyataan yang sama juga didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian terkait. Mayoritas dari subjek penelitian menyatakan bahwa Australia memiliki kebijakan yang sangat ramah/*friendly* terhadap disabilitas. hal ini dikarenakan Australia menempatkan permasalahan disabilitas sebagai suatu isu yang harus segera diselesaikan dan menjadi *concern* utama dalam kebijakannya. Lebih

lanjut, konsep kemandirian dan *self-problem approach* terhadap penyandang disabilitas menjadi visi utama yang dikenalkan oleh Australia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan suatu keadaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas (Nursyamsi, 2018).

Disamping itu, kultur dan pandangan masyarakat Australia terhadap disabilitas patut dicontoh. Sikap masyarakat Australia sangat terbuka dan *aware* terhadap penyandang disabilitas, keberadaan mereka bukan merupakan sesuatu yang baru atau aneh untuk ditemui dalam kehidupan sosial keseharian. Australia juga memiliki sistem pendanaan yang mumpuni dan terkoordinasi untuk membantu penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka (Santi Utami Dewi, 2018). Kemudian, Australia juga memiliki fasilitas umum yang sangat ramah terhadap penyandang disabilitas dan dapat diakses dengan mudah oleh mereka. Pemerintah Australia menyediakan fasilitas yang sangat mumpuni bagi penyandang disabilitas untuk kemudian dapat hidup mandiri dan jauh dari *stereotype* disabilitas sebagai sebuah hambatan atau beban.

Lebih lanjut, peran organisasi dan lembaga disabilitas juga sangat proaktif dalam proses realisasi kebijakan dan advokasi hak penyandang disabilitas di Australia. Berikut ini penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan, implementasi dan kerjasama yang terjalin di Australia untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

A. *National Disability Strategy 2010-2020*

Gambar 4.1 Pola interaksi National Disability Strategy



Sumber : (Governments, 2010)

National Disability Strategy merupakan kebijakan jangka panjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas. NDS 2010–2020 merupakan kebijakan nasional yang mencakup desain universal untuk meningkatkan pelayanan dan akses manfaat bagi masyarakat Australia penyandang disabilitas. Pada tahun 2011, *Council of Australian Government* (COAG) mendukung NDS 2010-2020 dan siap untuk di implementasikan keseluruh wilayah Australia.

Kerangka kerja sepuluh tahun untuk mendorong peningkatan di seluruh kebijakan, program, layanan dan infrastruktur *mainstreaming* serta sistem layanan khusus penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang setara dan memiliki akses yang sama. Dengan kata lain, strategi ini mengikat semua Pemerintah Australia untuk mengambil tanggung jawab atas komitmen Australia terhadap Konvensi PBB, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akses dan hasil layanan yang baik bagi penyandang disabilitas.

Kebijakan ini disetujui oleh semua tingkat Pemerintah Australia. Adanya komitmen antara semua tingkat pemerintah, organisasi dan penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadikan strategi ini lebih produktif untuk memenuhi hak disabilitas. Pendekatan nasional yang terpadu dan program pembangunan menjadi agenda utama yang diperkenalkan melalui NDS terhadap Masyarakat Australia. Lebih lanjut, dalam proses realisasinya NDS menjadi tanggung jawab *Disability Reform Council* (DRC) bersama dengan semua tingkatan Pemerintah Australia. Secara resmi, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dengan *framework* yang lebih luas dan terpadu. Adapun visi utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu keadaan Masyarakat Australia inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk memenuhi potensi mereka sebagai warga negara yang setara.

NDS memiliki enam fokus tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Pertama, *inclusive and accessible communities*, komunitas yang inklusif dan dapat diakses terkait fasilitas umum termasuk didalamnya transportasi umum, taman, bangunan, perumahan, teknologi informasi digital dan komunikasi dan kegiatan sosial, olahraga, rekreasi dan budaya. Kedua, *rights protection, justice and legislation*. Perlindungan hak, keadilan dan legislasi termasuk didalamnya seperti tindakan anti-diskriminasi, mekanisme pengaduan, pembelaan, sistem pemilihan dan peradilan. Ketiga, *economic security* terkait keamanan ekonomi termasuk didalamnya seperti peluang untuk mendapat

pekerjaan, kemandirian finansial, dukungan pendapatan yang memadai bagi mereka yang tidak dapat bekerja dan perumahan. Keempat, *personal and community support*, terkait dukungan personal dan komunitas termasuk didalamnya inklusi dan partisipasi dalam kemasyarakatan, mendapatkan layanan dengan basis *person-centered* yang disediakan oleh layanan khusus penyandang disabilitas dan bentuk pelayanan yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Kelima, *learning and skill* terkait pembelajaran dan keterampilan termasuk didalamnya seperti pendidikan dan perawatan anak usia dini, pendidikan lanjutan dan pendidikan kejuruan (transisi dari pendidikan ke pekerjaan). Keenam, *health and wellbeing* terkait kesehatan dan kesejahteraan termasuk didalamnya layanan kesehatan, promosi kesehatan dan interaksi antara sistem kesehatan dan disabilitas.

NDS menjadi wujud komitmen Pemerintah Australia untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UNCRPD. Untuk memaksimalkan Implementasi Kebijakan NDS, Pemerintah Australia membaginya menjadi tiga tahap kebijakan yang telah di implementasikan yaitu tahap pertama yang diberi nama sebagai *Laying Groundwork 2011-2014*, dan tahap kedua yang sedang berjalan yaitu *Driving Action 2015-2018*.

1. Laying Groundwork 2011-2014

Merupakan implementasi tahap pertama dari NDS, *mainstreaming*, penetapan dasar-dasar, perencanaan dan penyampaian program layanan utama bagi disabilitas. Pemberian pemahaman terkait NDS menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk menjamin proses implementasi tahap berikut kedepannya. Melalui implementasi *Laying Groundwork 2011-2014* terdapat enam rencana tindakan yang dilakukan. Pertama, mempengaruhi sistem kebijakan dan proses pemberian layanan (*support system*) yang tengah berlaku (*mainstream*) melalui tinjauan berkala tentang perjanjian nasional, dan dilakukan oleh COAG dan anggota lainnya. Kedua, membentuk *Disability Champion Ministers* yang terdiri dari menteri-menteri dari berbagai aspek yang menjadi tujuan NDS seperti Menteri Kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Dengan tujuan untuk dapat menjadi pelaksanaan NDS dan bertindak sebagai ahli untuk isu-isu disabilitas sesuai dengan bidang mereka. Ketiga, penyalarsan rencana terkait disabilitas antara pemerintah negara bagian

dan teritori melalui NDS. Keempat, melibatkan penyandang disabilitas dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Kelima, mengembangkan, mengkaji ulang dan mengimplementasikan rencana atau inisiatif pemerintah negara bagian dan teritori yang melengkapi tujuan dari NDS. Keenam, mempertahankan komitmen kerjasama antara semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan tujuan dari NDS.

Secara umum, terdapat perubahan yang signifikan yang terjadi selama proses implementasi tahap pertama NDS baik dalam ranah federal maupun negara bagian dan teritori. Untuk melihat seberapa signifikan perubahan yang terjadi terkait implementasi kebijakan NDS. Penulis melakukan analisa terkait tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia sesuai dengan enam tujuan yang ingin dicapai dalam NDS, sebagai berikut ;

a. Inclusive and accessible communities

Menciptakan keadaan yang inklusi dan dapat diakses oleh semua komunitas menjadi tujuan pertama yang ingin di capai melalui NDS. Lebih lanjut, perubahan telah mulai dilakukan melalui kebijakan sistem pengaturan dan perancangan terkait desain bangunan serta transportasi *Access to Premises-Buildings Standards 2010* dan *Disability Standards to Accessible Public Transport* (Departement of infrastructure, 2011). Proses pembangunan dan penyediaan fasilitas fisik dengan merujuk pada konsep *design universal*. Semua negara bagian dan teritori telah mengakui kewajiban mereka terhadap standar ini dalam memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya kedalam kebijakannya.

Kebijakan ini menetapkan standar-standar pembangunan bangunan dan penyediaan transportasi umum di Australia. Semua negara bagian dan teritori memiliki kewajiban untuk mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan melalui kebijakan tersebut. Lebih spesifik, terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi oleh *provider* transportasi di Australia seperti penyediaan pintu yang lebih besar, penyediaan *low-entry* disetiap transportasi umum, pemberian *special sign* untuk penumpang pengguna kursi roda. Sementara pemerintah menyediakan halte bis yang mudah

diakses oleh penyandang disabilitas, penyesuaian jarak antara jarak bis dengan trotoar, penyediaan *guiding block* disetiap halte bis.

Pengembangan terkait penyediaan transportasi umum yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas telah banyak berkembang di Australia. Pada tahun 2010, Pemerintah *Victoria* mengumumkan inovasi terkait transportasi umum yang ramah terhadap disabilitas yang diberi nama "*Smart Bus*". Bis ini merupakan transportasi ramah disabilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bis ini dilengkapi dengan *special sign* untuk penumpang penyandang disabilitas dan pintu *low-entry* untuk memudahkan pengguna kursi roda memasuki bis dan pintu masuk yang lebih besar serta jarak antara trotoar dan pintu bis yang sangat dekat.

Lebih lanjut, pada tahun 2017 Pemerintah Australia Barat mengeluarkan Kebijakan *Disability Access and Inclusion Plan (DAIP)*, terkait komitmen pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang ramah terhadap penumpang disabilitas (Authority, 2018). Dengan bentuk realisasi kebijakan yaitu dengan menghasilkan inovasi transportasi umum yang diberi nama "*Transperth*".

Inovasi terkait transportasi umum juga ikut berkembang dalam ranah pengadaan bus sekolah khusus bagi disabilitas. Seperti halnya yang terjadi di *New South Wales*, pemerintah telah menyediakan 1200 layanan bus sekolah khusus di *Sydney* dan sejumlah besar layanan bus sekolah khusus setiap hari di daerah pedesaan. Siswa penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan bus sekolah khusus, dapat menggunakan layanan alternatif yang umumnya disediakan oleh layanan taksi yang dapat diakses kursi roda. Di *Sydney*, sekitar 600 dari 800 taksi yang dapat diakses kursi roda menyediakan "*school runs*". Kemudian di *Victoria*, 80 % layanan bus sekolah dapat diakses pengguna kursi roda pada hari kerja (Killeen, 2014). Di *Western Australia*, Otoritas Transportasi Umum (*the public transport authority*) mengatur kontrak untuk *School Bus Services (SBS)* yang bertanggung jawab untuk menyediakan siswa dan siswa pedesaan yang memenuhi syarat dengan bantuan transportasi gratis kebutuhan khusus untuk akomodasi sekolah.

Australia dapat dikatakan telah memiliki transportasi dan fasilitas umum yang ramah, untuk membantu mobilisasi penyandang disabilitas dalam keseharian mereka. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Arni Surwanti, sebagai perwakilan *Difable Person Organization* (DPO) yang pernah mendapatkan pelatihan *International Mental Leadership Program* di Australia. Menyatakan bahwa aksesibilitas terkait transportasi dan fasilitas umum di Australia sangat inovatif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas umum untuk membantu mobilisasi aktifitasnya (Surwanti, 2018).

Gambar 4.2 Aksesibilitas fasilitas umum



Sumber : (Surwanti, 2018)

Aksesibilitas dalam bidang olahraga juga menjadi fokus utama yang menjadi *concern* dalam implementasi kebijakan NDS oleh Pemerintah Australia. Pada tahun 2012, *the Australian Sports Commission* mempertahankan investasi berkelanjutan dalam olahraga bagi penyandang disabilitas melalui *Australia's Winning Edge 2012-2022 strategy*. Komisi ini menginvestasikan \$ 13,3 juta pada 2014-15 untuk mendukung program *Paralympic* dan dana sebesar \$ 1,25 juta dalam delapan organisasi olahraga nasional untuk penyandang disabilitas Australia. Pada 2013, Pemerintah *New South Wales* mendukung olimpiade khusus antar Asia-Pasifik *the Special Olympics Asia Pacific Games on Hunter Region Australia*. Sebanyak 1.700 atlet penyandang disabilitas dari Australia dan luar negeri saling menunjukkan keahlian dalam kompetisi internasional ini (Services D. o., 2014).

Kemudian dalam ranah menciptakan kondisi teknologi informasi yang lebih inklusif dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Semua tingkatan Pemerintah Australia telah mengimplementasikan strategi *Web Accessibility National Transition Strategy*, dan mengadopsi *Web Content Accessibility Guidelines Version 2.0*(WCAG 2.0). Strategi ini memiliki tujuan untuk membantu menciptakan lingkungan online dan digital inklusif, dimana penyandang disabilitas dapat mengakses informasi dan layanan serta terlibat dengan keputusan pemerintah. *Australian Government Agencies* melaporkan kemajuan yang cukup besar terkait strategi dalam menerapkan WCAG 2.0. Tercatat 1,7 juta halaman web, 1.300 situs web dan 1.100 aplikasi web yang menerapkan WCAG 2.0(Services D. o., 2014).

Pada tahun 2013, *the Australian Government Department of Communications* memperkenalkan *Captioning Quality Standard* untuk semua stasiun televisi di Australia. *Standart Captioning* merujuk kepada pemberian teks dalam setiap acara televisi. Semua keterangan di televisi harus dapat dibaca, akurat, dan dapat dipahami oleh pemirsa tuna rungu dan yang mengalami gangguan pendengaran. Kebijakan ini mendapatkan respon yang baik oleh stasiun televisi dan organisasi yang *concern* terhadap hak pemirsa tuna rungu.

Menurut *Australian Bureau of Statistics 2015-2016* terkait aksesibilitas, secara keseluruhan 77,4% penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan fisik, mengunjungi tempat-tempat umum dan terlibat dengan teman dan keluarga. Lebih lanjut, tingkat partisipasi sosial untuk penyandang disabilitas menurun seiring bertambahnya usia. Lebih spesifik, sebanyak 93,7% anak muda penyandang disabilitas yang berusia 5 hingga 14 tahun berpartisipasi dalam satu atau lebih kegiatan dalam 12 bulan lebih tinggi, dibandingkan dengan penyandang disabilitas yang berusia 15 hingga 64 tahun (81,1%) dan yang berusia 65 tahun ke atas (69,7%)(ABS, 2015)

b. Rights protection, justice and legislation

Tujuan kedua yang ingin dicapai oleh NDS ialah perlindungan hak, keadilan dan legislasi termasuk didalamnya seperti tindakan anti-

diskriminasi, mekanisme pengaduan, sistem pemilihan dan peradilan. Pemerintah Australia membuat *National Disability Advocacy Program*, dengan tujuan utama untuk memberi penyandang disabilitas akses advokasi disabilitas yang efektif yang mempromosikan, melindungi, dan memastikan kenikmatan penuh dan setara dari semua hak asasi manusia yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Australia memberikan dana advokasi sebesar \$ 16,5 juta di bawah program NDAP untuk mendanai 59 organisasi di seluruh Australia.

Dalam ranah negara bagian dan teritori, Pemerintah Victoria mendirikan pusat peradilan disabilitas atau *disability justice centre* pertama di Australia. *Pusat peradilan ini* menyediakan akomodasi yang aman untuk penyandang disabilitas yang telah melakukan pelanggaran akantetapi memiliki kondisi yang memungkinkan untuk dikurung dalam penjara pada umumnya (Australia G. o., 2014). Meskipun pembangunan pusat peradilan disabilitas saat ini masih terbatas, inisiasi ini telah mendapatkan banyak perhatian dari pemerintahan pusat, negara bagian dan teritori lainnya sebagai tindakan yang patut dicontoh.

Dalam ranah sistem pemilu terjadi perubahan yang signifikan dimana Pemerintah Australia mulai menerapkan sistem pemilu berbasis telepon bahkan *online*. Tahun 2010, pada saat Pemilu Federal berlangsung *Australian Election Commission* menerima *voting* yang diberikan oleh pemilih yang memiliki kebutuhan khusus seperti kebutaan atau *low vision* untuk dapat melakukan pemilihan melalui telepon. Pada tahun 2011, Pemerintah *New South Wales* juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan proses *voting* berbasis telepon dan online yaitu *iVote* bagi penyandang disabilitas. Meskipun dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang memiliki penglihatan yang terganggu, sistem *voting* ini dapat menjadi alternatif lain yang dapat digunakan selain *voting* pos (Devenish, 2013). Sistem *voting* basis telepon dan *online* yang dilakukan *New South Wales* dinyatakan sukses dan mengundang banyak *feed back* positif.

c. Economic security

Tujuan ketiga yang ingin dicapai melalui NDS ialah keamanan ekonomi. Di tingkat nasional Pemerintah Australia telah bekerja untuk meningkatkan permintaan terhadap perusahaan - perusahaan di Australia. Peningkatan permintaan terhadap sumber daya manusia penyandang disabilitas menjadi target utama pemerintah agar mereka dapat mendapatkan dan tetap bekerja. Departemen ketenagakerjaan melalui *Wage Connect initiative* telah menghasilkan lebih dari 13.700 orang penyandang disabilitas yang ditempatkan dalam pekerjaan selama inisiatif ini. Pada tahun 2012, Komisi Layanan Publik Australia memperkenalkan strategi *the As One - Australian Public Service (APS)* untuk meningkatkan tingkat perekrutan tenaga kerja dari penyandang disabilitas melalui *Australian Public Service (APS)* antara tahun 2012 dan 2014 (Services D. o., 2014). APS juga mengembangkan proses konsultasi terkait keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk kemudian diarahkan dalam mencari pekerjaan. Menurut *Australian Bureau of Statistics* menyatakan bahwa 85 % penyandang disabilitas mayoritas bekerja dalam sektor privat.

Lebih lanjut, *Disability Employment Services* juga memberikan bantuan untuk mengatasi hambatan pekerjaan dan untuk mendukung individu penyandang disabilitas di tempat kerja. Pemerintah menginvestasikan lebih dari \$ 3 miliar selama empat tahun untuk membuka akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, dan memastikan untuk didapatkannya dukungan yang mereka butuhkan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan Kementerian Sosial Indonesia yaitu Santi Utami Dewi pada saat melakukan kunjungan terkait implementasi NDS, dinyatakan bahwa Departemen Pelayanan Ketenagakerjaan memberikan subsidi terhadap perusahaan yang menerima penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan tersebut dan hal ini patut dicontoh untuk menciptakan peluang kerja bagi penyandang disabilitas dalam sektor privat (Santi Utami Dewi, 2018).

Dalam ranah negara bagian dan teritori, inisiatif terkait kebijakan ketenagakerjaan banyak terjadi. Pendekatan inovatif lainnya adalah produksi DVD oleh Pemerintah Tasmania untuk mendorong bisnis negara

untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Sementara itu, Pemerintah *New South Wales* mengeluarkan program layanan transisi keluarga atau *Transition to Work (TTW) programme*, untuk mendukung penyandang disabilitas muda untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pada tahun 2013–14, 68,6% lulusan dari program ini mendapatkan pekerjaan atau pendidikan lanjutan (Services D. o., 2014).

d. Personal and community support

Tujuan ke empat merujuk kepada dukungan personal dan komunitas, termasuk didalamnya inklusi dan partisipasi dalam kemasyarakatan. Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan *National Disability Insurance Scheme* sebagai bentuk dukungan signifikan dalam ranah personal dan komunitas bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini menerapkan pendekatan *person-centered* dalam proses realisasinya. Untuk mengakses NDIS, penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan akses, individu yang memenuhi persyaratan akan disebut sebagai partisipan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seperti ; pertama, memastikan ketersediaan NDIS di wilayah tempat tinggal. Kedua, partisipan harus berumur dibawah 65 tahun pada saat mengakses NDIS. Ketiga, terkait residensi partisipan harus merupakan Warga Negara Australia, memegang visa permanen atau visa kategori khusus yang dilindungi. Keempat, terkait keadaan fisik, partisipan memiliki gangguan atau kondisi yang cenderung permanen. Lebih lanjut, memiliki kerusakan substansial yang mengurangi kemampuan partisipan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari, dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Serta memerlukan dukungan dari NDIS seumur hidup untuk membantu kehidupan.

Pada tahun 2013, NDIS mulai dikenalkan kepada Masyarakat Australia sebagai alternatif pendanaan yang berbentuk asuransi sosial. NDIS merupakan rancangan inti dari reformasi ekonomi dan sosial yang akan memberikan keadilan, keamanan, dan peluang bagi lebih dari 460.000 (tahun 2019) Masyarakat Australia dan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan atas dasar keadilan (Services D. o., 2014). NDIS memberikan

jaminan sosial dalam bentuk asuransi bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat. Dalam jangka waktu implementasi kebijakan NDIS tahap pertama 2011-2014, semua yurisdiksi negara bagian telah menandatangani dan menyetujui NDIS. Skema asuransi sosial ini pertama kali diluncurkan sebagai uji coba (*trial*) pada tiga wilayah yaitu *Australian Capital Territory*, *Northern Territory* dan *Western Australia*. Proses realisasi NDIS mendapatkan respon positif dari penyandang disabilitas Australia. Pada tahun 2014, dari 8,585 partisipan yang telah mengakses NDIS, sebanyak 7,316 yang diterima (Services D. o., 2014). Mayoritas dari partisipan menyatakan kepuasannya akan NDIS, dan menyatakan bahwa sistem asuransi ini membantu mereka untuk lebih mudah mengakses layanan sesuai dengan tingkat disabilitas yang mereka miliki. Pemerintah Australia (Federal) menyediakan dana sebesar \$ 1,5 miliar untuk proses realisasi NDIS (*trial*) 2013-2014.

Untuk memperoleh NDIS, partisipan diberi hak untuk menentukan *National Disability Insurance Agency* (NDIA) sesuai dengan kebutuhan dan jenis serta tingkat disabilitas yang dimiliki. Setelah partisipan disabilitas diterima untuk mengakses NDIS, mereka kemudian akan diarahkan untuk memilih NDIA sesuai dengan kebutuhan dan pilihan partisipan itu sendiri. Dalam ranah negara bagian dan teritori, pada tahun 2012 Pemerintah *New South Wales* melalui program *Stronger Together* untuk menghadirkan 47.200 tempat tinggal bagi penyandang disabilitas yang lebih ramah bagi mereka. Kemudian, melalui program *Ability Links* Pemerintah NSW sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah, penyandang disabilitas dan komunitas. Untuk saling terkoneksi dalam menyediakan perencanaan terkait disabilitas. hingga 2014, sebanyak 1.327 individu yang setuju untuk membantu dalam proses pendampingan disabilitas dan menghasilkan 44.500 kontak komunitas terkait yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai perencanaan pendampingan disabilitas (Services D. o., 2014).

Di *Victoria*, inisiasi peningkatan akses teknologi bantuan terus dilakukan. Pemberian bantuan bersubsidi seperti peralatan umum, rumah, dan modifikasi kendaraan untuk penyandang disabilitas permanen di *Victoria*. Program ini juga memberikan jenis layanan 24/7 setelah jam

kerja untuk melayani kerusakan peralatan. Pada tahun 2014, program ini memberikan lebih dari 36.000 item kepada hampir 29.000 orang di seluruh *Victoria*.

Di *Queensland*, the *Community Aids Equipment and Assistive Technologies Initiative* memberikan bantuan terhadap pelamar disabilitas berupa bantuan subsidi untuk peralatan untuk membantu mereka berpartisipasi dalam komunitas pilihan mereka. Lebih lanjut, Pemerintah *Queensland* memberikan bantuan perumahan bagi penyandang disabilitas yang berusia 25 tahun dan berada dalam pengasuhan orang tua yang berusia 65 tahun keatas.

e. Learning and skill

Tujuan utama yang ingin dicapai ialah penyandang disabilitas dapat mencapai potensi penuh mereka, melalui partisipasi dalam sistem pendidikan berkualitas tinggi inklusif dan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan berkualitas tinggi dan pelatihan yang ditargetkan secara universal diakui oleh Pemerintah Australia, sebagai prasyarat penting untuk mendapatkan kemandirian dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Pemerintah Australia mencoba untuk menyelaraskan aspirasi dan kapasitas untuk dapat mencapai tingkat pencapaian personal yang tidak berbeda untuk penyandang disabilitas dan Masyarakat Australia lainnya.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil sekolah dan pendidikan untuk semua siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas. Melalui pendekatan *Student First*, Pemerintah Australia bekerjasama dengan negara bagian dan teritori untuk membuat perbedaan nyata bagi semua siswa dengan berfokus pada bidang utama otonomi sekolah, guru berkualitas, kurikulum yang efektif, dan keterlibatan orang tua. Proses pendampingan ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan kepada para siswa penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan mereka. Lebih lanjut, Pemerintah Australia (Federal) memberikan dukungan pendanaan yang lebih banyak terhadap inisiatif pendidikan siswa penyandang disabilitas dan telah menginvestasikan \$ 300 juta selama tahun ajaran 2012 hingga 2014.

Pada tahun 2012, penyandang disabilitas dalam usia kerja (16-64 tahun) yang menyelesaikan kualifikasi pendidikan *post-school* meningkat sebesar 5%. Lebih lanjut, mayoritas penyandang disabilitas (67 % dari mereka yang berusia 5-20 tahun) mengambil bagian di kelas reguler di sekolah umum. Kemudian, 20 % dari mereka menghadiri kelas khusus di sekolah umum dan 13 % menghadiri kelas khusus (Services D. o., 2014).

Dalam ranah negara bagian dan teritori terdapat perubahan yang signifikan terkait peningkatan kualitas pendidikan terhadap siswa penyandang disabilitas. Tahun 2012, Departemen Pendidikan dan Komunitas mengeluarkan kebijakan yang diberi nama *Every Student, Every School*. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan di *New South Wales*. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas terjadi di lebih dari 2.240 sekolah negeri *New South Wales*. Hal ini dilakukan untuk lebih memenuhi kebutuhan belajar dan dukungan bagi siswa penyandang disabilitas dimana pun mereka mendaftar.

Pemerintah *New South Wales* berusaha untuk meningkatkan peluang bagi siswa penyandang dsabilitas, melalui sistem kerja ekstensif untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Sistem kerja ekstensif merujuk kepada penyediaan alat penilaian baru untuk membantu para guru memberikan pembelajaran. Lebih lanjut, dalam tindakan ini guru juga melakukan koordinasi dengan orang tua dan siswa itu sendiri. Pada tahun 2013 lebih dari 24.000 siswa di 556 sekolah yang terlibat dalam proses penerapan alat ini (Services D. o., 2014). Pemerintah juga mengembangkan situs web baru untuk meningkatkan informasi bagi komunitas sekolah tentang dukungan terhadap kebutuhan pendidikan siswa penyandang disabilitas.

Selanjutnya, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Santi Dewi Utami yang menyatakan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas di Australia sudah inklusif dan mudah diakses. Pada saat melakukan kunjungan terkait realisasi NDS di *Flinders University*, pihak kampus menyediakan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Misalnya, mahasiswa tersebut seorang tuna rungu maka pihak kampus akan memfasilitasinya *note-taken* untuk setiap mata kuliah yang

dikuti oleh mahasiswa tersebut. Lebih lanjut, pihak setiap kampus memiliki unit khusus terkait disabilitas yang membantu melayani semua kebutuhan penyandang disabilitas. Disamping itu, pihak kampus juga menyediakan rekaman mata kuliah dan buku berbasis braile.

Disabilitas tidak menjadi halangan bagi masyarakat Australia untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi dan penyediaan fasilitas fisik dan non-fisik bagi siswa penyandang disabilitas telah menjadi hal yang umum dalam sektor pendidikan Australia. Menurut Faris Al-Fadhat, menyatakan bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas tidak menjadi hambatan yang berarti dalam menempuh pendidikan. Mahasiswa penyandang disabilitas sangat mudah ditemui dalam lingkungan kampus dan mereka baik-baik saja dengan keadaan mereka karena pihak kampus memfasilitasi mereka sesuai dengan standar universal (Al-Fadhat, 2018). Dalam artian mahasiswa penyandang disabilitas diberikan fasilitas yang sama dengan mahasiswa pada umumnya.

f. Health and wellbeing

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui bidang ini ialah menciptakan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, termasuk didalamnya layanan kesehatan, promosi kesehatan dan interaksi antara sistem kesehatan disabilitas.

Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan kebijakan melalui Departement Kesehatan telah memperluas jenis pembiayaan pengobatan melalui program *Disability Care or Medicare Program*. *Medicare* merupakan layanan Pemerintah Federal yang menyediakan pembayaran dan layanan untuk perawatan kesehatan dan obat-obatan. Dan termasuk didalamnya perawatan rumah sakit umum gratis, bantuan biaya perawatan di luar rumah sakit, dan obat-obatan bersubsidi. Dibawah NDS, Pemerintah Federal Australia melakukan pendekatan universal dan berkomitmen untuk memperluasketerlibatan serta keterwakilan penyandang disabilitas diseluruhdemografi Australia. Pemerintah Australia akan menyediakan \$ 19,3 miliar selama tujuh tahun, mulai dari 2012-13 untuk meluncurkan *DisabilityCare* Australia di seluruh Pemerintahan Australia (Australia C. o., 2013).

Di *Victoria*, sebuah proyek peningkatan kesadaran (*awareness-raising project*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, akan perlu dilakukannya *screening* terkait penyakit kanker di antara lebih dari 7.000 wanita dengan disabilitas intelektual. Para wanita didorong untuk mendiskusikan pemeriksaan kesehatan dengan dokter umum mereka dan melakukan tes kesehatan terkait. Pada tahun 2013, proyek ini juga memasukkan pelatihan bagi staf layanan disabilitas untuk mendukung para wanita selama proses tersebut.

Pemerintah Australia Barat, membangun pendekatan inklusif untuk layanan kesehatan melalui pembentukan *Disability Health Network*. Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kemudian menginformasikan serta mempengaruhi pengembangan sistem kesehatan Australia Barat. Pada akhir 2014, tercatat 3.227 orang terdaftar sebagai anggota *Disability Health Network*, termasuk para profesional layanan kesehatan, keluarga, tenaga pegasuh dan penyandang disabilitas (Services D. o., 2014).

Lebih lanjut, Pemerintah Tasmania melakukan realisasi kebijakan yang sedikit unik yaitu dengan mengembangkan serangkaian wawancara video tentang penyandang disabilitas dan pengalaman mereka dalam sistem perawatan kesehatan. Sembilan video sketsa yang dikembangkan sebagai bagian dari *Disability Awareness Project*. Video ini akan digunakan oleh para profesional kesehatan dan mahasiswa sebagai sarana pembelajaran terkait peningkatan sistem layanan kesehatan disabilitas di Tasmania.

2. *Driving Action 2015-2018*

Driving Action 2015-2018, merupakan proses implementasi kebijakan tahap kedua oleh Pemerintah Australia. Dengan fokus implementasi kebijakan tertuju pada proses implementasi lanjutan terkait *project* dan program-program yang telah direncanakan pada saat tahap pertama implementasi NDIS. Pada tahap kedua rencana implementasi, Pemerintah Australia secara spesifik akan memfokuskan implementasi kebijakan terkait transisi NDIS secara penuh dan peningkatan kualitas pelayanan disabilitas terhadap penduduk aborigin dan kepulauan (*aboriginal and torres strait islander people with disability*). Dengan menjadikan NDIS sebagai skema utama asuransi nasional yang dapat diakses oleh penyandang

disabilitas Australia, untuk memperoleh kebutuhannya dari semua sektor kehidupannya.

a. Transisi implementasi NDIS

Pada tahap ini, transisi implementasi NDIS untuk menjadi skema asuransi layanan disabilitas komprehensif, dan di implementasikan diseluruh wilayah Australia menjadi fokus utama realisasi kebijakan Pemerintah Australia. Pada tahun 2013 (tahap pertama implementasi), NDIS pertama kali di kenalkan dalam bentuk uji coba (*trial*) kepada Masyarakat Australia sebagai skema asuransi sosial untuk menjamin semua kebutuhan disabilitas dari berbagai sektor kehidupan.

Pada saat itu, NDIS hanya di implementasikan kepada tiga negara bagian dan teritori Australia seperti *Australian Capital Territory*, *Northern Territory* dan *Western Australia* dan mendapatkan respon positif dari penyandang disabilitas Australia. Berlandaskan pada pencapaian ini, Pemerintah Australia kemudian melakukan kebijakan transisi NDIS keseluruh negara bagian dan teritori Australia. Pada proses ini, mayoritas negara bagian dan teritori telah menandatangani perjanjian bilateral antar negara bagian dan teritori untuk mengimplementasikan NDIS secara penuh dalam semua sektor layananan kebutuhan disabilitas. Negosiasi terkait perjanjian bilateral untuk transisi NDIS dengan *Western Australia* terus berlanjut.

Tabel 4.1 Perjanjian bilateral transisi NDIS

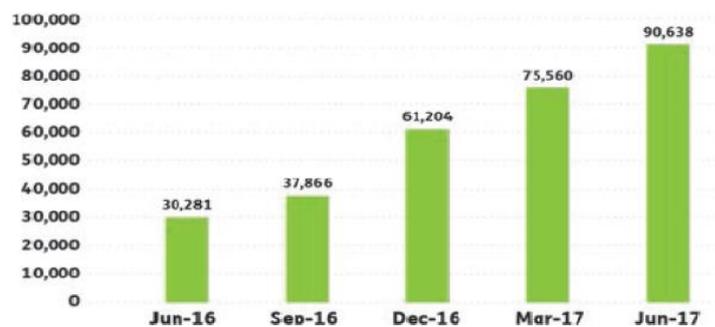
No	Jurisdiction	Bilateral Agreement Signed
1	<i>Australian Capital Territory</i>	7 December 2012
2	<i>New South Wales</i>	16 September 2015
3	<i>Victoria</i>	16 September 2015
4	<i>Tasmania</i>	11 December 2015
5	<i>South Australia</i>	11 December 2015
6	<i>Queensland</i>	16 March 2016
7	<i>Northern Territory</i>	5 May 2016

Sumber : (Services D. o., 2015)

Setelah melakukan perjanjian bilateral, setiap negara bagian dan teritori memiliki kewajiban untuk merealisasikan NDIS kedalam sistem layanan disabilitas masing-masing pemerintah.

Lebih lanjut, pada akhir tahun 2016-2017, evaluasi terkait realisasi kebijakan NDIS (*full scheme*) telah dilakukan dan menunjukkan suatu peningkatan yang signifikan. Partisipan NDIS pada tahun ini mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan peningkatan hasil dan respon positif masyarakat penyandang disabilitas terhadap realisasi NDIS. Berikut ini terdapat grafik yang menunjukkan mengenai peningkatan akses NDIS oleh penyandang disabilitas Australia.

Bagan 4.1 Jumlah Partisipan Akses NDIS 2016-2017



Sumber : (Services D. o., NDIS Annual Report, 2017)

Pada pertengahan Juni 2016 jumlah partisipan yang dapat mengakses NDIS berjumlah 30.281 partisipan, dan pada bulan September jumlah partisipan meningkat menjadi 37.866 partisipan. Pada Desember 2016, terjadi peningkatan yang signifikan terkait jumlah partisipan NDIS yaitu 61.204 partisipan. Pada bulan Maret 2017, jumlah partisipan kembali meningkat dan mencapai 75.560 partisipan. Lebih lanjut, pada bulan juni jumlah partisipan yang mengakses NDIS mencapai 90.638 partisipan. Dan pada 31 Desember 2017, jumlah partisipan yang secara resmi bergabung dengan NDIS mencapai 142.000 partisipan (NDIS, 2018).

Menurut laporan NDIS 2016-2017, menyatakan bahwa sekitar 85% dari peserta melaporkan bahwa mereka puas dengan proses perencanaan selama 2016-2017, dan secara tidak langsung mencerminkan peringkat dari proses implementasi NDIS berjalan baik sangat baik yang relatif tinggi.

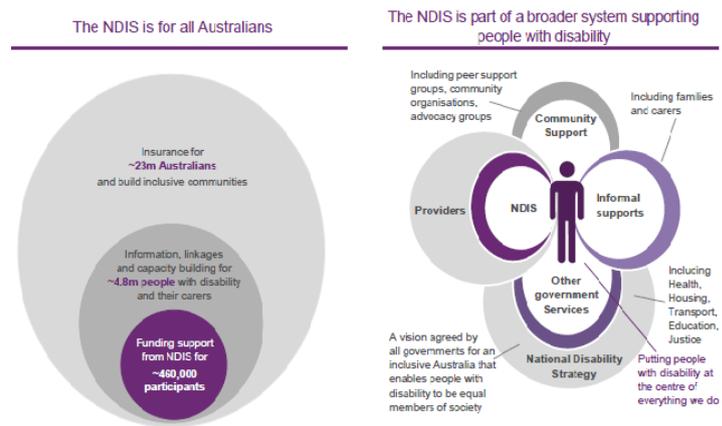
1. National Disability Insurance Scheme (NDIS)

NDIS merupakan kebijakan asuransi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas permanen untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Dengan menggunakan pendekatan *person-centered* dan konsep *universal design*, NDIS menjadi kebijakan inti dari NDS untuk memenuhi hak penyandang disabilitas Australia. Skema asuransi nasional disabilitas menjadi program implementasi yang ditujukan untuk 460.000 penyandang disabilitas di Australia untuk dapat mendapatkan akses jaminan terhadap semua kebutuhannya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti Masyarakat Australia lainnya. Untuk menentukan kepentingan terbaik, memiliki pilihan dan kendali atas hidup mereka. NDIS mengakui bahwa semua kebutuhan dan tujuan setiap orang berbeda. NDIS memberikan dukungan individual kepada individu dan fleksibilitas untuk mengelola dukungan mereka. Sehingga dapat membantu mereka mencapai tujuan dan menikmati kehidupan seperti biasanya. NDIS menggantikan sistem disabilitas yang tidak adil dan tidak efisien dengan sistem nasional baru yang terkemuka di dunia, adil dan berkelanjutan.

NDIS menempatkan penyandang disabilitas sebagai pusat dan pemegang kendali utama terhadap akses layanan yang dibutuhkannya melalui NDIS. Disamping itu, penyandang disabilitas tetap akan mendapatkan berbagai macam dukungan lainnya diluar NDIS (*community support*) dan layanan terkait disabilitas lainnya sesuai dengan enam tujuan NDS seperti *health, housing, transport, education and justice*. Keterlibatan keluarga dan orangtua dalam proses implementasi NDIS menjadi hal yang penting untuk dilakukan (*informal supports*). Lebih lanjut, proses implementasi NDIS telah disetujui oleh semua negara bagian dan teritori. Sehingga memudahkan partisipan atau penyandang disabilitas untuk dengan mudah mengakses NDIS terdekat.

Gambar 4.3 Implementasi NDIS



Sumber : (NDIS, 2018)

Terkait pendanaan NDIS, terhitung pada tanggal 30 juni 2017, dukungan pendanaan senilai \$ 7,3 milyar telah diberikan kepada para partisipan melalui NDIS (NDIS, 2018). Dan merupakan hasil *funding* yang dilakukan oleh Pemerintah Australia (Federal) serta negara bagian dan teritori. Dengan rincian dana sebesar \$ 1,5 milyar diberikan pada saat NDIS (*trial 2013-2015*). Pendanaan sebesar \$ 3,2 milyar terkait dengan dukungan NDIS yang dilakukan pada tahun 2016-2017 dan pendanaan \$ 2,6 miliar terkait dengan dukungan yang dilakukan pada tahun 2017-18 dan seterusnya.

Lebih lanjut, terdapat beberapa kategori layanan disabilitas yang dapat diakses melalui NDIS. Sesuai dengan standar layanan disabilitas dalam NDIS terdapat tiga kategori utama layanan yang dapat diakses. Pertama, kategori *Core Supports* meliputi bantuan dalam kehidupan sehari-hari (*assistance*), transportasi, konsumsi, bantuan dalam partisipasi sosial dan masyarakat (*assistance*). Kedua, kategori *Capital Support* meliputi teknologi bantu, modifikasi rumah. Ketiga, kategori *Capacity Building Services* meliputi koordinasi dukungan, pengaturan hidup yang lebih baik, peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, menemukan dan mempertahankan pekerjaan, meningkatkan hubungan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan,

peningkatan pembelajaran, peningkatan pilihan hidup, dan peningkatan kehidupan sehari-hari.

2. *National Disability Insurance Agency (NDIA)*

NDIA merupakan lembaga pemerintah independen, yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan mengelola NDIS. Kemudian, memastikan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. NDIA memiliki tugas untuk membangun kepercayaan (*disability trust*) antar partisipan, keluarga, komunitas, pasar layanan disabilitas dan *stakeholder* lainnya.

Pihak agensi menerima pendanaan NDIS yang diberikan oleh Pemerintah Australia (Federal), negara bagian dan teritori. Kemudian, NDIA bertugas untuk mengelola dana sesuai dengan NDIS dan mengatur akses partisipan ke NDIS. Lebih lanjut, agensi memberikan persetujuan (*approved form*) pendanaan individual dan memberikan saran dalam proses penyusunan *access plan* terkait layanan yang dibutuhkan oleh individu tersebut sesuai dengan tingkat disabilitas. Kemudian meninjau rencana partisipasi serta mengarahkan kepada layanan yang dibutuhkan.

Lebih spesifik, NDIA juga bekerjasama dengan mitra dalam program penyedia pendanaan bagi organisasi masyarakat di wilayah pemerintahan lokal untuk membantu dalam proses penyebarluasan informasi dan pendanaan NDIS ke seluruh wilayah negeri. Pada tahun 2016-2017 saat transisi NDIS ke skema penuh, NDIA juga menerima \$ 475,5 juta dari pendapatan dalam bentuk barang (non-tunai) dari Pemerintah Australia.

NDIA menjadi salah satu perantara yang digunakan oleh Pemerintah Australia dalam menyalurkan NDIS. Tindakan ini mendapat respon yang positif dari organisasi atau lembaga disabilitas sekitar. Mayoritas dari mereka kemudian mendaftar untuk menjadi anggota NDIA untuk membantu pemerintah dalam proses implementasi. Agensi atau lembaga penyedia layanan disabilitas berkembang pesat dan bervariasi.

NDIA memiliki layanan unggulan masing-masing yang mereka tunjukkan sesuai dengan *expertise* terkait layanan disabilitas. Seperti *Disability Services Agency* yang bergerak pada penyaluran dana NDIS terkait layanan mobilitas, *training* dan *job finder* bagi masyarakat penyandang disabilitas di *New South Wales*. Terdapat agensi *Guide Dogs* yang khusus melayani mobilisasi keseharian penyandang disabilitas netra, dengan teknis penyandang disabilitas akan didampingi oleh seekor anjing terlatih sebagai penunjuk jalan dan sebagiannya.

Lebih lanjut, sejak dilakukannya Kebijakan NDIS *transition full scheme 2016-2017*, jumlah agensi yang mendaftar sebagai NDIA meningkat signifikan dan tersebar diseluruh wilayah Australia.

Tabel 4.2 Jumlah NDIA di Australia

No	Negara bagian dan Teritori	NDIA		Jumlah
		NDIS trial	NDIS transition	
1	ACT	261	814	1.075
2	NSW	1461	4301	5.762
3	NT	42	383	425
4	QLD	139	1484	1.623
5	SA	522	1153	1.705
6	TA	260	730	990
7	VIC	896	2532	3.428
8	WA	255	756	1.011

Sumber : Olah data (NDIS, 2018)

b. Aboriginal and Torres Strait Islander People with disability

Seperti yang diketahui, penyandang disabilitas yang merupakan penduduk aborigin dan kepulauan (*aboriginal and torres strait islander people with disability*), lebih cenderung sedikit memiliki akses dalam layanan disabilitas. lebih lanjut, hal ini menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan, mengingat penduduk aborigin dan kepulauan merupakan bagian dari pada Australia dan berhak untuk mendapatkan akses yang sama terkait layanan disabilitas. Penyelesaian permasalahan terkait kesenjangan layanan disabilitas yang didapatkan oleh penyandang disabilitas penduduk aborigin dan kepulauan (*aboriginal and torres strait islander people with disability*), menjadi agenda spesifik yang dilakukan oleh semua tingkatan Pemerintah Australia pada tahap ke dua

implementasi kebijakan NDS. Pada tahap ini, Pemerintah Australia menginginkan untuk terjadinya peningkatan akses terhadap semua layanan disabilitas untuk penduduk aborigin dan kepulauan.

Pada tahun 2009, Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan kebijakan *National Indigenous Reform Agreement* yang digunakan sebagai *framework* utama dalam penanganan disabilitas untuk *aboriginal and torres strait islander people with disability*. Pada tahap ini pemerintah pusat, negara bagian dan teritori berkomitmen untuk berusaha menyelesaikan permasalahan kesenjangan disabilitas yang di alami penduduk pribumi Australia. *Closing the Gap programme* menjadi program implementasi kebijakan utama yang direalisasikan oleh semua tingkatan Pemerintah Australia. Terdapat empat fokus peningkatan yang ingin dicapai untuk mengurangi tingkat kesenjangan terkait layanan disabilitas oleh *aboriginal and torres strait islander people with disability*, seperti ; *infancy and early childhood, education, employment, economic development, healthy lives*.

Pertama, *infancy and early childhood*. Pemerintah Australia memiliki sejumlah program yang memprioritaskan investasi pada kesehatan anak dan ibu untuk penduduk aborigin Australia. Pendanaan sebesar \$ 94 juta diinvestasikan selama tiga tahun (2015-2018) melalui pendekatan *Better Start to Life*. Dengan perincian dua program perluasan yaitu *Australian Nurses Family Partnership Program and New Directions: Mother and Infant Service Program* (Australia C. o., 2018). Untuk mendanai berbagai inisiatif anak usia dini untuk mendukung ibu muda, orang tua dan keluarga. Termasuk kelompok bermain yang difasilitasi, kelas pengasuhan, program kunjungan ke rumah dan penjangkauan. Kegiatan-kegiatan ini membangun pengetahuan dan keterampilan orang tua dan mempromosikan perkembangan anak-anak yang sehat.

Pada tahun 2010, melalui *National Partnership Agreement* (NPA) terkait akses universal ke pendidikan anak usia dini. Pemerintah pusat (Federal) telah menyalurkan dana sebesar \$ 3,2 miliar kepada negara bagian dan teritori (Australia C. o., 2018). Untuk memastikan setiap anak

Australia memiliki akses ke program pendidikan anak usia dini yang berkualitas termasuk didalamnya untuk penduduk pribumi atau aborigin. Pada tahun 2016, dari semua anak aborigin atau pribumi yang terdaftar dalam pendidikan anak usia dini, 93% telah mengikuti program pendidikan anak usia dini selama setidaknya satu jam dalam seminggu. Porsentase ini mendekati angka program pendidikan anak usia dini oleh non-pribumi sebesar 96 %.

Kedua *education*, melalui *Aboriginal and Torres Strait Islander National Education Policy* (AEP). Pemerintah Australia telah menguraikan tujuan-tujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan yang mendukung siswa dan komunitas aborigin dan *torres strait islander*. Pada tahun 2014, melalui *Indigenous Advancement Strategy* (IAS) telah menyediakan lebih dari \$ 1,3 miliar untuk mendukung komunitas aborigin dan *torres strait islander* dari tahun-tahun awal masa kanak-kanak mereka (Australia C. o., 2018). Termasuk didalamnya pendidikan dasar dan menengah, hingga kualifikasi pasca sekolah dan masuk ke dunia kerja.

Pada 2017, *Indigenous Peoples Scholarship Program and Indigenous Support Program* menyediakan dana tambahan untuk universitas. Program ini menawarkan pemberian beasiswa, tutorial, dan bantuan lainnya kepada 18.000 mahasiswa Aborigin dan *Torres Strait Islander* Australia. Dan telah di implementasikan ke 40 universitas di seluruh Australia.

Ketiga *employment*, tahun 2015 Pemerintah Australia (Federal) mengeluarkan layanan pekerjaan dipusat-pusat perkotaan dan regional untuk menampung pekerja pribumi yang diberinama *Jobactive*. Pada bulan Juli 2015, sekitar 81.000 penempatan kerja telah dapat diakses oleh penduduk pribumi atau aborigin Australia (Australia C. o., 2018).

Lebih lanjut, pada tahun yang sama pemerintah bersama *community development services* (CDP) melalui program berbasis komunitas yang difokuskan untuk membantu pencari kerja untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman terkait pekerjaan, mengatasi hambatan, dan mendapatkan pekerjaan. Dan telah disampaikan ke 60 wilayah dan lebih dari 1.000 komunitas. Program ini telah mendukung pencari kerja jarak

jauh untuk mengakses sekitar 21.600 pekerjaan (termasuk lebih dari 15.700 pekerjaan untuk pribumi Australia).

Tahun 2018, pemerintah memperkenalkan perluasan cakupan dalam *Transition Services to the Workplace program*. Untuk semua penduduk aborigin dan *torres strait islander* usia 15-21 yang tidak bekerja atau belajar. Layanan ini menyediakan dukungan pra-pekerjaan secara intensif untuk meningkatkan kesiapan kerja anak-anak muda dan membantu mereka bekerja (termasuk pelatihan dan pelatihan awal) atau pendidikan. Diperkirakan bahwa sekitar 4.600 pemuda per tahun akan mendapatkan manfaat dari layanan ini.

Keempat *healthy lives*, melalui *Aboriginal National Health and Torres Strait Islander 2013-23 Plan*. Strategi Pemerintah Australia untuk memberikan hasil kesehatan yang lebih baik bagi penduduk aborigin Australia. Pemerintah telah mengalokasikan pendanaan sebesar \$ 3,6 milyar selama empat tahun (dari 2014-18), diberikan melalui *The Indigenous Health Program of Australia* untuk menerapkan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam rencana pelaksanaan kesehatan. Pada 2015-16, 4,8 juta skrip pembayaran dan subsidi pengobatan telah dikeluarkan dan telah membantu lebih dari 277.000 pasien (Services D. o., 2015). Lebih lanjut, pada tahun 2018 jumlah asuransi kesehatan untuk penduduk aborigin dan *torres strait islander* dalam NDIS terus mengalami peningkatan yang signifikan.

B. Melakukan kerjasama dengan NGO terkait layanan disabilitas

Dalam proses implementasi suatu kebijakan dapat dipastikan bahwa kerjasama dan koordinasi menjadi hal yang perlu untuk dilakukan. Kerjasama dari semua pihak menjadi kunci utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan probabilitas terimplementasinya kebijakan secara efektif dan efisien. Keadaan ini kemudian menjadi rujukan Pemerintah Australia dan NGO untuk menjalin kerjasama dalam implementasi kebijakan terkait layanan disabilitas.

Sebelumnya, dalam ranah implementasi kebijakan NDS 2010-2020 Pemerintah Australia telah berhasil melakukan kerjasama dengan agensi-agensi

layanan disabilitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti NDIA. Namun, disisi lain terdapat NGO yang menjadi lembaga non-profit yang memiliki peran sebagai pemberi masukan dan *review* terkait kebijakan Pemerintah Australia serta advokasi terkait layanan disabilitas yaitu *The Australian Federation of Disability Organisations* (AFDO).

AFDO merupakan sebuah organisasi perkumpulan *Disability People's Organizations* (DPO), yang terdiri dari 16 organisasi yang tersebar diseluruh wilayah Australia. Organisasi ini memiliki empat tugas utama seperti ; mendukung organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas, melobi pemerintah dan lembaga lain tentang isu-isu disabilitas, menasihati pemerintah dan organisasi lain tentang kebijakan disabilitas mereka, menginformasikan dan mendidik masyarakat umum tentang disabilitas, dan meneliti masalah disabilitas. Misi utama AFDO ialah untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan membantu mereka berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan Australia. Keanggotaan terbuka untuk organisasi nasional dan negara penyandang disabilitas. hal ini kemudian menjadikan skala wawasan dan jangkauan terkait isu disabilitas yang dimiliki AFDO cenderung bersifat komprehensif. Kemudian, menjadi organisasi nasional utama yang mengadvokasi kepada Pemerintah terkait kepentingan semua orang penyandang disabilitas di Australia.

Dalam proses implementasi kebijakan *National Disability Services* tahap pertama, AFDO melakukan *review* terkait kebijakan tersebut dan memberikan masukan terkait implementasi kebijakan. Pada tahun 2014, AFDO yang mewakili mayoritas suara organisasi nasional memberikan masukan melalui laporan *Disabled People's Organizations Australia : Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-20120*(SCARCI, 2014). Laporan ini menjelaskan bahwa dalam proses implementasi NDS 2014, penyandang disabilitas belum secara komprehensif diikutsertakan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Hal yang serupa juga di sampaikan oleh *Disabled People's Organizations Australia* yang menyatakan bahwa dalam Strategi Nasional Disabilitas Australia juga harus memperhatikan pemenuhan hak penduduk asli Australia yaitu penduduk aborigin penyandang disabilitas. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa perlunya terjadi peningkatan keterlibatan penduduk pribumi Australia seperti aborigin dan *torres strait islander people*. Permasalahan kesenjangan dalam proses layanan

disabilitas masih banyak di alami oleh mereka. Oleh karenanya, melalui laporan tersebut AFDO sebagai federasi DPO Australia melakukan advokasi terkait keterlibatan dan peningkatan hak akses layanan disabilitas oleh penduduk aborigin dan *torres strait islander*.

Peninjauan kembali terkait implementasi yang dilakukan oleh AFDO menjadi masukan yang penting untuk dipertimbangkan dan mendapat respon baik dari Pemerintah Australia. Lebih spesifik, *review* ini menjadi bahan masukan (input) dalam proses implementasi kebijakan *NDS tahap kedua Driving Action 2015-2018*. Peningkatan keterlibatan serta hasil implementasi kebijakan ini menunjukkan perubahan positif yang signifikan terhadap kualitas layanan disabilitas terhadap penduduk aborigin dan *torres strait islander people*. Kerjasama yang baik antara NGO disabilitas dengan Pemerintah Australia ini telah secara tidak langsung meningkatkan akses pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, AFDO juga memberikan tanggapan positif terkait program utama NDS yaitu NDIS dengan menempatkan bentuk jaminan asuransi sosial bagi para penyandang disabilitas untuk dapat mengakses hak dan kebutuhannya. Pendekatan *person-centered* menjadi hal yang sangat krusial untuk tetap dilakukan untuk menciptakan kemandirian bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur AFDO Ross Joyce yang menyatakan bahwa proses transisi NDIS menjadi hal yang patut untuk disambut dan didukung bersama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas yang lebih luas dan komprehensif.

Lebih lanjut, AFDO melakukan kerjasama dengan Pemerintah Australia terkait pelayanan advokasi dan *mainstreaming* informasi terkait akses NDIS, untuk membantu penyandang disabilitas Australia dalam mengakses hak dan kebutuhannya. Dibawah kerjasama ini, AFDO menginisiasi untuk terbentuk aplikasi dan laman *website Disability Loop* untuk membantu penyandang disabilitas di seluruh wilayah Australia untuk dapat mengakses informasi dan berdiskusi mengenai NDIS. *Disability Loop* menyediakan yang komprehensif terkait informasi, administrasi, dan akses pendanaan terkait NDIS untuk semua wilayah Australia.

Kerjasama antara Pemerintah Australia dengan AFDO telah menghadirkan alternatif advokasi terkait akses layanan disabilitas yang lebih mudah bagi seluruh penyandang disabilitas Australia. Pemerintah Australia telah bersama dengan NGO disabilitas telah berusaha secara maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut, menurut pendapat Risnawati Utama yang menyatakan terkait implementasi kebijakan publik seperti layanan disabilitas, kunci utama yang harus dipegang ialah koordinasi dan kerjasama antar semua pihak untuk mau terlibat dalam proses tersebut (Utami, 2018). Dalam kasus implementasi kebijakan layanan disabilitas di Australia, inisiatif untuk terjadinya koordinasi antar tingkat pemerintah telah sejak lama dilakukan. Dan perkembangan layanan disabilitas di Australia sangat dinamis. Maka tidak menjadi sesuatu yang mengherankan Australia menjadi salah satu contoh negara yang memiliki layanan yang baik untuk disabilitas. Karena semua pihak bersinergi bersama untuk memenuhi kebutuhan disabilitas salah satunya dengan maksimalisasi implementasi kebijakan.